

Strategi Publik Dalam Dinamika Permintaan Dan Penawaran

Yanti Aneta

Abstrak

Strategi yang diadopsi oleh pemerintah dan pejabat publik memiliki dampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana strategi dibentuk, dan bagaimana sumber daya (manusia, uang, teknologi, dan komitmen masyarakat) dapat digerakkan untuk mencapai tujuan penting. Geoff Mulgan memberikan analisis tentang bagaimana merencanakan suatu strategi dan melaksanakan rencana ke dalam tindakan nyata.

Kata Kunci : Strategi, Kebijakan, Dinamika, Pemerintahan, Penawaran

Pendahuluan

Mulgan mengemukakan bahwa strategi publik adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan. Pandangan Mulgan tersebut di atas mengandung arti bahwa strategi dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan pemerintah yang memuat ide-ide dan gagasan-gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan.

Mengembangkan strategi menurut Mulgan adalah sebagian dari proses strategi. Dalam mengembangkan strategi melibatkan berbagai masalah yang harus dapat dipecahkan secara sederhana. Adanya kolaborasi dan kompleksitas dalam proses strategi mengarah pada buruknya keputusan yang dihasilkan. Strategi yang baik didasarkan pada pengalaman pemerintah dalam memahami, menilai dan menganalisis situasi lingkungan baik eksternal dan internal.

Penjelasan Mulgan tersebut memberikan pengertian tentang perlunya manajemen strategi atau strategi publik. Hal ini mengingatkan bahwa pada umumnya setiap negara dalam melaksanakan kegiatannya dihadapkan pada perubahan lingkungan, yakni lingkungan internal dan eksternal. Semakin besar suatu negara, maka semakin kompleks pula kegiatan yang dihadapi. Salah satu implikasi dari kompleksitas itu ialah proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit.

Pengertian Strategi Publik

Menurut Glueck William F. dan Jauch Lawrence R, yang diartikan dengan strategik adalah: *“A Strategic is a unified, comprehensive, and integrated plan that relates the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment and that*

is designed to ensure that the basic objectives of the enterprise are achieved through proper execution by the organization “. Artinya sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategik perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pengertian strategik di atas, yaitu: Pertama, Adanya suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan bukan hanya tujuan jangka pendek, akan tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Kedua, Untuk menyusun suatu strategik, diperlukan analisis terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal, yaitu peluang dan ancaman tantangan maupun kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini penting untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Ketiga, Perlunya suatu keputusan pilihan dan pelaksanaan yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan perusahaan. Keempat, Strategi dirancang untuk menjamin agar tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui langkah-langkah yang tepat.

Mulgan (2009:19) mengemukakan bahwa strategi publik adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan. Publik dalam hal ini adalah orang atau masyarakat dari suatu Negara. Mulgan (2009:1) mengemukakan bahwa strategi publik memberi arah bagaimana pemerintah berfikir dan bertindak. Strategi terbaik yaitu memberikan kejelasan kepada pemerintah tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Pandangan Mulgan tersebut di atas mengandung arti bahwa strategi dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan pemerintah yang memuat ide-ide dan gagasan-gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan. Penjelasan Mulgan tersebut memberikan pengertian tentang perlunya manajemen strategi atau strategi publik. Hal ini mengingatkan bahwa pada umumnya setiap negara dalam melaksanakan kegiatannya dihadapkan pada perubahan lingkungan, yakni lingkungan internal dan eksternal. Semakin besar suatu negara, maka semakin kompleks pula kegiatan yang dihadapi. Salah satu implikasi dari kompleksitas itu ialah proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit.

Kenyataan menunjukkan bahwa di negara sedang berkembang khususnya di Indonesia dengan ciri yang sangat pluralis dari seluruh aspeknya bahkan disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah barang tentu menghadapi persoalan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang sangat kompleks, apalagi potensi dan sumber daya

pembangunan yang tersebar tidak merata diseluruh wilayah nusantara, sementara konsentrasi jumlah penduduk yang terpusat di pulau jawa merupakan tantangan administrasi negara sepanjang zaman. Disinilah perlunya manajemen strategi atau strategi publik.

Public Action: The Dynamics Of Supply And Demand
(Tindakan Publik Dinamika Penawaran Dan Permintaan)

Tindakan publik dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah termasuk cara pemerintah berfikir untuk mencapai tujuan yang menyangkut masyarakat/negara. Tindakan publik juga dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan *supply* dapat diartikan sebagai pasokan, persediaan, perlengkapan, stok, persiapan, dan penawaran. Dalam hal ini menyangkut tindakan pemerintah untuk menyediakan, memberikan, memenuhi, melayani, membekali, melengkapi dan menyampaikan kewajibannya kepada masyarakat. Sementara itu, *demand* dapat diartikan sebagai permintaan, atau tuntutan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak menuntut dan meminta, menyampaikan kebutuhan dan keperluan, menagih haknya dan menyuruh pemerintah.

Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Semakin kecil *GDP*, maka penawaran pemerintah menjadi terbatas dalam memberikan pelayanan publik. Sementara itu, kurva permintaan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam beberapa situasi, masyarakat mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan yang diinginkan dengan harga yang wajar. Namun di lain waktu, situasi ini menjadi tidak stabil. Ketika harapan dan tuntutan masyarakat melebihi kapasitas yang dimiliki pemerintah, maka hasilnya adalah ketidakpercayaan dan rasa kegagalan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya ketika kapasitas pemerintah melebihi harapan masyarakat, maka masyarakat menjadi lebih puas dan mereka memandang pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang sah.

Pemerintah juga berusaha untuk mempengaruhi kurva permintaan masyarakat dengan mengurangi harapan masyarakat sehingga lebih realistis, atau mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab lebih. Pemerintah berperan dalam kegagalan pasar.

Namun ada anggapan bahwa pemerintah hanya bertindak bilamana ada bukti jelas dari kegagalan pasar.

Inovasi Dalam Peralatan

Mulgan (2009:40) mengemukakan bahwa beberapa Negara pada dekade terakhir telah membawa sejumlah besar perubahan kepada pemerintah dan pemerintahan, dalam pergeseran reformasi manajemen publik, transformasi, rekayasa ulang, dan modernisasi yang didorong baik oleh politisi dan para pemimpin birokrasi yang dinamis. Adanya beberapa alat manajemen seperti manajemen mutu terpadu dan manajemen publik baru telah mendorong pemerintah menjadi lebih efisien, lebih terinformasi, memiliki ketepatan tujuan, dan kecepatan umpan balik. Pasokan pemerintah menjadi meningkat dan masyarakat bisa menuntut pemerintah untuk menyediakan kebutuhan mereka.

Inovasi dalam peralatan telah mempengaruhi setiap bidang tindakan pemerintah. Beberapa alat baru telah mengubah cara pemerintah dalam menjelaskan, mengamati dan menilai lingkungan sekitar baik lingkungan internal dan eksternal. Juga untuk mengetahui kesalahan dalam pemerintahan dari hari ke hari. Dengan adanya inovasi dalam peralatan, pemerintah memiliki alat pembanding dan alat untuk mengukur kepuasan masyarakat misalnya mengukur kepuasan masyarakat terhadap hasil diagnose dokter dan hasil operasi rumah sakit. Beberapa alat baru berfungsi untuk membantu penilaian dengan harapan bahwa penilaian menjadi lebih sehat. Pandangan Mulgan di atas memberikan kejelasan bahwa peralatan mutakhir seperti alat-alat dalam dunia kedokteran dan inovasi peralatan dalam bidang lainnya dapat membuat pemerintah lebih efisien dan meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Adanya inovasi dalam peralatan merupakan upaya yang sangat efektif dalam mendukung tindakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap langkah-langkah inovatif dalam peralatan yang mendukung manajemen pemerintahan. Pemerintah dapat mendorong pemanfaatan hasil-hasil inovasi pada dunia industri dan peralatan lainnya yang lebih sarat muatan teknologinya. Aspek lain yang penting adalah pelatihan kepada masyarakat agar mampu menggunakan peralatan canggih.

Tugas Pemerintah

Mulgan (2009:41) mengemukakan bahwa tugas pertama pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman, khususnya ancaman invasi, perang saudara,

dan bencana alam seperti banjir dan kelaparan. Jika pemerintah gagal melindungi masyarakat maka pemerintah akan kehilangan legitimasi. Tugas kedua pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan menyediakan perawatan untuk orang sakit dan miskin. Tugas ketiga pemerintah adalah untuk menegakkan keadilan, menghukum kejahatan dan menyelesaikan sengketa. Tugas keempat pemerintah adalah untuk mempromosikan kebenaran, membantu masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya, baik melalui agama atau yang lebih baru melalui ilmu pengetahuan.

Pemerintah harus memiliki ketaatan dan loyalitas terhadap keempat tugas atau tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat tugas atau tujuan inilah yang menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah harus berperan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2000 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di

dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: (1) pelayanan (*service*), akan membuahkan keadilan dalam masyarakat; (2) pemberdayaan (*empowerment*) akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan (*development*) akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Determinan Perubahan: Demokrasi, Pengetahuan, dan Koneksi

Mulgan (2009:44) mengemukakan bahwa ada tiga tren saling menguatkan yang mempengaruhi perubahan pemerintah sampai pada saat ini, yaitu (1) penyebaran demokrasi; (2) pertumbuhan pengetahuan; (3) munculnya koneksi.

Demokrasi menurut Mulgan mendorong masyarakat untuk membuat tuntutan kepada Negara/pemerintah dan ini pada gilirannya memaksa negara untuk mengurus hal-hal praktis yang dibutuhkan masyarakat. Pada bagian ini Mulgan memberikan banyak contoh tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh demokrasi. Ini berarti bahwa demokrasi memberikan kontribusi besar yang mempengaruhi pemerintahan dalam melakukan perubahan. Demokrasi itu sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: Pertama, Pemerintah dari rakyat (*government of the people*); Kedua, Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); Ketiga, Pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat, bukan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Mulgan (2009:47) juga mengemukakan bahwa kapasitas atau kemampuan pemerintah untuk bertindak tergantung pada pengetahuan, baik pengetahuan masyarakat maupun pengetahuan pemerintah sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah

tidak selalu tergantung pada pengetahuan mata-mata, pedagang atau duta besar, tetapi ditunjang oleh kemampuan berfikir sendiri dan keakuratan informasi yang dimilikinya. Mulgan memberikan banyak contoh tentang peranan pertumbuhan pengetahuan dalam kegiatan pemerintah. Salah satu contoh adalah pentingnya pengetahuan pemerintah tentang statistik. Penggunaan metode ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, atau menjalankan sistem pensiun.

Dengan adanya pengetahuan, pemerintah juga merasa terdorong untuk bersaing dalam membuat bisnis mereka cerdas, dan lebih cepat untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi.

Mulgan (2009:51) mengemukakan bahwa kinerja pemerintah juga dipengaruhi oleh keterkaitan antara: (1) adanya migrasi baik legal, ilegal dan suaka; (2) peredaran obat terlarang; (3) kejahatan terorganisir seperti mafia; (4) penyebaran penyakit menular baru seperti flu burung; (5) kompetisi untuk investasi bernilai tinggi; (6) perdagangan perang; (7) kekayaan intelektual perang; (8) kebijakan persaingan internasional seperti Microsoft dan Google.

Reformasi: Pasar, Efisiensi, dan New Public Management

Mekanisme pasar memberi arah bagi perubahan dan cenderung memberi banyak informasi dan umpan balik bagi pemerintah. Ini berarti ide di belakang reformasi didukung oleh data-data yang berkembang dalam mekanisme pasar. Perubahan iklim pasar menjadi faktor pendukung bagi para pembuat kebijakan untuk melihat setiap bidang kegiatan manusia. Dengan demikian kebijakan sosial disesuaikan dengan mekanisme pasar.

New Public Management (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik (APA yang dilakukan negara) dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi (pemerintah) dan oleh badan penanggungjawab yang independen atau swasta.

Administrasi dan badan penanggungjawab melaksanakan tugas yang diserahkan oleh negara atas dasar perumusan order secara kuantitatif dan kualitatif, lalu disepakatilah

anggaran biaya untuk pelaksanaan order tersebut (order kerja dan anggaran umum). Bagi sementara orang, *NPM* adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management; bagi yang lain, *NPM* dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan manajemen sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dan pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada rakyat.

Masalah Kepercayaan

Mulgan (2009:66) mengemukakan bahwa liberalisasi dan desentralisasi menumbuhkan anggapan ketidakpercayaan dimana pemerintah tidak lagi melayani kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya, maka tidak dapat menyediakan sumber daya dengan baik. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan sumber daya dengan baik, maka masyarakat menjadi tidak puas dan tidak percaya.

Dengan demikian perhatian utama pemerintah adalah bagaimana kekuasaan dan sumber daya terbaik harus digunakan, dan bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan bisa terjadi. Pemerintah harus sangat efektif dalam memanfaatkan pendapatan. Penanganan suatu kasus yang berlarut-larut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik pemimpin, lembaga hukum, birokrasi, maupun partai politik. Kemunduran kepercayaan publik juga didorong isu-isu negatif di masyarakat.

Kesejahteraan sebagai Tujuan Utama

Dalam sejarah manusia yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah untuk melindungi wilayahnya. Kemudian pada abad kedua puluh pusat perhatian beralih ke perekonomian. Kekuatan ekonomi bahkan lebih penting daripada kekuatan militer. Strategi pemerintah yaitu peduli diri dengan pertumbuhan industri ekspor, menghindari kemerosotan atau menarik masuknya investasi. (Mulgan, 2009:67). Implikasi utama kebijakan publik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pemerintahan jangka panjang memfokuskan upaya pemerintah pada kondisi yang memungkinkan manusia berkembang dan tidak mengabaikan kesejahteraan.

Penjelasan diatas mengandung makna bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak. Tak hanya dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, dan rakyat pun menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama setiap langkah usahanya. Setiap langkah usaha dilakukan dalam seluruh aspek, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan. Dan kesemua itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lahir maupun batin.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang memungkinkan pengembangan potensi dirinya secara utuh untuk mencapai taraf kesejahteraan yang sebaik-baiknya. Setiap warga negara yang tergolong miskin berhak memperoleh pelayanan dasar sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap warga negara berhak terhindar dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya yang dapat merendahkan derajat martabat kemanusiaannya. Warga negara yang menjadi korban bencana alam, sosial, penelantaran serta berada dalam situasi buruk lainnya berhak memperoleh bantuan dan jaminan kesejahteraan. Warga negara yang memiliki hambatan fisik, mental, sosial dan ekonomi berhak mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi. Setiap warga negara yang mengalami ketunaan dan penyimpangan perilaku berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Warga negara yang berada di daerah terpencil dan terisolir berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan khusus.

Dalam menyelenggarakan sistem kesejahteraan, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan, memberikan kompensasi kepada kelompok yang beresiko akibat kebijakan negara, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi sosial serta pendayagunaan sumber dalam pelayanan kesejahteraan, merumuskan kebijakan dan legislasi bidang kesejahteraan, melaksanakan analisis dan audit terhadap aktivitas pembangunan, menetapkan standard pelayanan minimal, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan jaringan kerja nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan, dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antara Permintaan dan Pasokan

Beberapa negara telah memiliki kinerja yang baik dan efektif berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan pemerintah, dan pemahaman terhadap masyarakatnya. Sebagian besar negara maju meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya ini termasuk dalam kebijakan ekonomi makro, pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan publik utama lainnya. (Mulgan, 2009:71).

Pemerintah di negara-negara maju sangat kompeten dalam pelaksanaan berbagai macam tugas, meskipun ada beberapa penyimpangan seperti kegagalan untuk mengatur kredit di tahun 2000-an. Pemerintah berperan dalam perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu permintaan untuk kesehatan dan pendidikan termasuk keamanan harus dapat dipenuhi dengan baik.

Kesimpulan

Wawasan yang mendalam Geoff Mulgan tentang perubahan berasal dari pemahaman yang mendalam tentang dinamika masyarakat modern, kreativitas pribadi dan komitmen untuk kemajuan sosial. Geoff Mulgan, memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan pengalaman yang luas dalam pemerintahan dapat menunjukkan bagaimana keberhasilan atau kegagalan strategi memberi dampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulgan memeriksa strategi dari perspektif yang unik dari organisasi publik dan pemerintah serta ditulis dengan mengacu pada contoh dari berbagai konteks internasional. Tulisan Mulgan menyediakan kerangka yang jelas untuk berpikir strategis di organisasi publik.

Tujuan akhir dan utama dari strategi dalam sebuah demokrasi adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memiliki kapasitas dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sementara masyarakat dapat memberikan ide-ide bagus, energik, dapat meningkatkan kinerja dan mendukung inovasi pemerintah. Masyarakat memiliki tingkat kapasitas, tingkat kualifikasi dan keterampilan, memiliki ide-ide dan mampu melakukan banyak hal dengan baik.

Daftar Pustaka

- Andrew, K. R. 1980. *The Concept of Corporate Strategy*. New York: Richard D. Irwin Inc.
- Argyris et. al. 1985. *Handbook of Strategy Management*. New York.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1975. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cornell University. Press. Ithaca and London, PT. Gramedia, Jakarta.
- Gerry Johnson dan Kevan Scholes . *Exploring Corporate Strategy* (Paperback) (0273711911).
- Hamel , G & C.K Prahalad. 1995. *Competing for The Future*. Boston: Harvard Bussiness School Press.
- Henry Mintzberg. 1994. *Rise and Fall of Strategic Planning* (9780029216057)
- Mulgan Geoff. 2009. *The Art Of Public Strategi (Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good)*
- Porter, M.E. 1985. *Competitive Advantage*. New York: ree Press.
- Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.